

# **SKRIPSI**

## **PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN PROTES TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN 70/PUU-XXII/2024 DI KOTA PONTIANAK**



**Program Studi Ilmu Politik**

**Disusun Oleh:**

**Khairul Bariyah  
NIM. E1052211020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
KOTA PONTIANAK  
2025**

**SKRIPSI**  
**PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN PROTES**  
**TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN**  
**KEPALA DAERAH PASKA KEPUTUSAN MAHKAMAH**  
**KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN**  
**70/PUU-XXII/2024 DI KOTA PONTIANAK**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh:**

**Khairul Bariyah**

**NIM. E1052211020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**KOTA PONTIANAK**  
**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN PROTES TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN 70/PUU-XXII/2024 DI KOTA PONTIANAK

Tanggung jawab Yuridis pada:

Khairul Bariyah  
E1052211020

Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing Utama

Drs. Asmadi, M.Si  
NIP. 196202041988101001

Tanggal: .....

Dosen Pembimbing Pendamping

Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si  
NIP. 198506092015041002

Tanggal: .....

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERAN MAHASISWA DALAM GERAKAN PROTES TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 DAN 70/PUU-XXII/2024 DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

**Khairul Bariyah**  
**NIM. E1052211020**

**Dipertahankan :**

Pada Hari/tanggal : Rabu/ 09 juli 2025  
Waktu : 10.00  
Tempat : Ruang Sidang 2

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Drs. Asmadi, M.Si  
NIP. 198506092015041002

Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si  
NIP. 198506092015041002

**Penguji Utama**

**Penguji Pendamping**

Hairil Anwar SE, M.Si  
NIP. 196905142007011004

Ahirul Habib Padilah S. IP , M. I. Pol  
NIP. 199205122022031003

**Disahkan Oleh:**  
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197205212006041001

## ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak. Isu mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini menarik untuk diteliti karena dianggap tidak transparan, merugikan demokrasi, dan membatasi partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur berupa buku dan artikel, serta dianalisis menggunakan teori Gerakan Sosial dari Sidney Tarrow (1998) yang mencakup tiga indikator: *Aggregate Frame*, *Consensus Frame*, dan *Collective Action Frame*. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan mahasiswa sesuai penerapannya *Aggregate Frame* menunjukkan bagaimana mahasiswa mengidentifikasi revisi tersebut sebagai masalah sosial yang merugikan demokrasi, tidak transparan, dan mengandung pasal-pasal yang berpotensi membatasi partisipasi publik. Kedua, melalui *Consensus Frame*, mahasiswa menyatukan berbagai isu ke dalam satu narasi kolektif yang menekankan perjuangan mereka mewakili kepentingan rakyat secara luas. Ketiga, *Collective Action Frame* menjelaskan strategi mahasiswa dalam memobilisasi massa melalui *framing* masalah, tawaran solusi konkret kepada pemerintah, serta seruan moral emosional untuk menggerakkan aksi. Melalui ketiga frame ini, mahasiswa di Pontianak berhasil membentuk solidaritas, membingkai isu secara strategis, dan menggerakkan aksi kolektif. Sehingga mendorong DPR untuk membatalkan revisi Undang Undang Pilkada.

**Kata kunci:** Mahasiswa, Revisi UU Pilkada, Gerakan Protes, Demokrasi.

## **ABSTRACT**

*This thesis aims to examine the role of university students in the protest movement against the revision of the Regional Head Election Law following the Constitutional Court Decisions No. 60/PUU-XXII/2024 and No. 70/PUU-XXII/2024 in Pontianak City. The issue surrounding the revision of the Election Law is considered significant to study due to concerns about its lack of transparency, potential harm to democracy, and limitations on public participation. This research utilizes secondary data obtained from literature studies, including books and articles, and is analyzed using Sidney Tarrow's (1998) Social Movement Theory, which includes three indicators: Aggregate Frame, Consensus Frame, and Collective Action Frame. The findings show that the student movement, in applying the Aggregate Frame, identified the revision as a social issue that undermines democracy, lacks transparency, and contains articles that may restrict public participation. Second, through the Consensus Frame, students unified various issues into a single collective narrative, emphasizing their struggle to represent the broader interests of the people. Third, the Collective Action Frame illustrates the strategies used by students to mobilize the masses through issue framing, offering concrete solutions to the government, and using emotional and moral appeals to inspire action. Through these three frames, students in Pontianak successfully built solidarity, strategically framed the issue, and mobilized collective action, ultimately pushing the House of Representatives (DPR) to cancel the revision of the Election Law. This demonstrates that students are capable of influencing public opinion and that their position is strong enough to directly shift political direction and policy.*

**Keywords:** *Students, Revision of the Pilkada Law, Protest Movement, Democracy.*

## **RINGKASAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Protes Terhadap Revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah Paska Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII /2024 di Kota Pontianak. Judul tersebut dipilih karena penelitian ini berlatar belakang dari sebuah masalah dimana DPR yang menentang putusan MK dan merevisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyebabkan adanya permasalahan di Masyarakat. Revisi Undang Undang yang dibuat oleh DPR dianggap tidak sesuai dan bertolak belakang dengan Keputusan MK serta di anggap menguntungkan pihak pihak tertentu dan merugikan Masyarakat sehingga memicu terjadinya aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Pontianak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak dengan mengidentifikasi bentuk keterlibatan, strategi, serta metode yang digunakan dalam aksi protes. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjelaskan motivasi serta faktor internal dan eksternal yang mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan menilai dampak gerakan mahasiswa terhadap kebijakan dan opini publik. Terakhir, penelitian ini mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam mengorganisir protes serta efektivitas gerakan mereka dalam dinamika demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma deskriptif untuk menganalisis peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut. data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber tertulis, wawancara mendalam dengan mahasiswa, akademisi, dan pihak terkait untuk memahami motivasi, strategi, serta tantangan dalam gerakan tersebut, Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar dapat menggambarkan secara komprehensif keterlibatan mahasiswa serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

Dalam menganalisis gerakan tersebut, digunakan teori gerakan sosial menurut Sidney Tarrow yang mencakup *Aggregate Frame*, *Consensus Frame*, dan *Collective Action Frame*. Mahasiswa diidentifikasi sebagai aktor penting yang mampu mengidentifikasi masalah sosial (*aggregate*), membentuk kesadaran kolektif (*consensus*), dan menggerakkan massa untuk bertindak (*collective action*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa berperan aktif sebagai katalisator perubahan sosial dan kontrol demokrasi. Aksi mereka turut mendorong DPR untuk menunda bahkan membatalkan pengesahan revisi Undang Undang Pilkada, yang menunjukkan bahwa kekuatan sipil memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kebijakan negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya keberadaan mahasiswa sebagai kekuatan politik nonformal yang mampu mengawal demokrasi. Perlu adanya kesinambungan gerakan mahasiswa yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa



mahasiswa berperan sebagai aktor politik nonformal yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat dan menekan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Gerakan ini menunjukkan bahwa kekuatan sipil, terutama dari kalangan intelektual muda, masih menjadi benteng terakhir dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar mahasiswa terus meningkatkan kapasitas kritis dan intelektual dalam merespons isu-isu kebijakan publik, serta memperkuat solidaritas lintas organisasi agar gerakan yang dilakukan lebih terarah dan berkelanjutan. Organisasi kemahasiswaan juga perlu mengembangkan strategi advokasi kebijakan yang lebih konstruktif di samping aksi demonstrasi, dengan memperkuat literasi hukum dan politik sebagai landasan gerakan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan lebih terbuka dalam menanggapi aspirasi mahasiswa serta mendorong dialog partisipatif untuk mewujudkan proses demokrasi yang inklusif. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan kajian lebih luas secara geografis maupun tematik, guna memperdalam pemahaman tentang dampak jangka panjang dari gerakan mahasiswa terhadap dinamika kebijakan dan partisipasi publik

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Khairul Bariyah

Nomor mahasiswa : E1052211020

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Khairul Bariyah  
NIM. E1052211020

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

"Jangan fokus pada apa yang hilang, tapi syukuri apa yang masih kamu miliki."

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Atas izin-Nya telah memperkanankan peneliti sehingga peneliti masih diberikan kesempatan untuk mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua peneliti khusus nya ayah Ramli yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan wejangan kepada peneliti untuk bersungguh sungguh dalam perkuliahan serta telah membiayai perkuliahan dan segala kebutuhan peneliti hingga saat ini peneliti ucapkan terimakasih sebesar besarnya tanpa ayah peneliti tidak akan sampai di titik sekarang. Semoga ayah sehat sehat.
2. Kepada ibu peneliti yaitu ibu Murni dan Ibu Titi peneliti ucapkan terimakasih karena telah memberikan semangat dan perhatian perhatian kecil yang sangat berharga.
3. Kepada saudara peneliti yaitu Khairunnisa terimakasih telah menjadi tempat curhat dan keluh kesah peneliti saat proses penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah Nya akhirnya Skripsi yang berjudul "Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Protes Terhadap Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Paska Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak" ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kota Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penelitian Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penelitian Skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.
2. Asmadi, M.Si selaku Pembimbing Utama, dan Herri junius Nge, S.Sos, M.Si selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penelitian Skripsi ini. baik secara metodologi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian Skripsi ini.
3. Hairil Anwar SE, M.Si selaku dosen Penguji utama sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) selama peneliti menjalankan perkuliahan, dan Ahirul Habib Padilah S. IP, M. I. Pol selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dan saran kepada peneliti.

4. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
5. Pihak mahasiswa Universitas Tanjungpura dan mahasiswa Politeknik Negeri Kota Pontianak yang menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Mahasiswa FISIP Untan Angkatan 2021 yang selalu menyemangati peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya sehingga terselesainya Skripsi

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang peneliti lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, Juli 2025

Khairul Bariyah  
Nim. E1052211020

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian .....	7
1.3 Fokus Penelitian.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1.6.1 Manfaat teoritis .....	8
1.6.2 Manfaat praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Konsep dan Teori .....	10
2.1.1 Teori Peran.....	10
2.1.2 Partisipasi Politik .....	14
2.1.3 Kekuatan Politik Mahasiswa .....	16
2.1.4 Gerakan Sosial Politik .....	20
2.2 Hasil penelitian yang relevan .....	25
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	29
2.4 Pertanyaan Penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Langkah Langkah Penelitian .....	32
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian .....	34
3.3.1 Lokasi penelitian.....	34
3.3.2 Waktu Penelitian.....	35
3.4 Subjek dan Objek .....	35
3.4.1 Subjek Penelitian .....	35
3.4.2 Objek Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Alat Pengumpulan Data .....	37
3.7 Analisis Data .....	37
3.8 Keabsahan Data.....	38
3.9 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Letak Geografis Kota Pontianak .....	41
4.2 Luas Wilayah.....	42
4.3 Kondisi demografi.....	43
4.4 Keadaan Iklim .....	44
4.5 Wilayah Administrasi .....	45
4.6 Penduduk.....	48
4.7 Pemerintahan dan Perangkat Daerah.....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
5.2 Pembahasan.....	58
5.2.1 Pendekatan melalui <i>Aggregate Frame</i> .....	60
5.2.2 Pendekatan melalui <i>Consensus Frame</i> .....	70
5.2.3 Pendekatan melalui <i>Collective Action Frame</i> .....	79
5.3 Dampak Dan Tindak Lanjut Gerakan Protes .....	84
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran.....	96
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	98

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	<i>halaman</i>
2.3 Alur pikir penelitian.....	29
3.3 Rencana Jadwal Penelitian .....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	<i>halaman</i>
1.1 Aksi Digulis Memanggil .....	5
4.5 Peta Kota Pontianak .....	47
5.1 Beda keputusan Mahkamah Konstitusi dan DPR soal Undang Undang.....	55
5.2.2 Aksi protes penolakan terhadap Revisi Undang Undang Pilkada.....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<i>halaman</i>
Pedoman Wawancara.....	103
Surat Tugas Penelitian.....	106
Dokumentasi Penelitian.....	109
Daftar Riwayat Hidup.....	112

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai gerakan protes di masyarakat terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi yang diusulkan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat. Keberadaan undang-undang ini sangat krusial, karena akan mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas kepemimpinan daerah. Salah satu isu penting yang muncul adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghindari terjadinya kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Dalam konteks ini, MK memandang bahwa kotak kosong dapat mengurangi legitimasi pemilihan, sehingga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Permasalahan ini dimulai semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan terkait batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia. Kejadian tersebut membuka mata masyarakat akan adanya politik dinasti yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut diperparah dengan kejadian baru-baru ini, yaitu revisi UU Pilkada yang dilakukan secara mendadak demi menganulir Putusan MK supaya Kaesang Pangarep dapat

dicalonkan sebagai Gubernur. Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah memicu berbagai reaksi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Pontianak. DPR secara tiba-tiba dan secepat kilat merevisi UU Pilkada setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat partai dan calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Putusan MK telah mengubah ambang batas pencalonan oleh partai politik yang ada di UU Pilkada sebesar dua puluh persen kursi DPRD atau dua puluh lima persen suara sah. MK menganulir ambang batas dalam UU Pilkada tersebut melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. MK kemudian memberikan syarat baru ambang batas didasarkan pada jumlah penduduk. Melalui putusan itu, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari enam koma lima persen hingga sepuluh persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu. Sementara keputusan Baleg DPR pada Rabu (21/8/2024) justru tetap mempertahankan ambang batas 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Namun, partai politik yang tak punya kursi di DPRD disyaratkan seperti yang diputuskan oleh MK.

UU Pilkada mengatur batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan calon bupati/wali kota adalah 25 tahun. Putusan MK nomor 70/PPU-XXII/2024 menegaskan batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wali kota/bupati tetap 25 tahun, saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik. Di sisi lain, keputusan Baleg DPR menyatakan batas usia paling rendah calon gubernur adalah 30 tahun dan batas usia calon wali kota/bupati adalah 25 tahun ketika resmi dilantik. Mereka malah mengacu pada keputusan MA dalam menyusun kebijakan ini, bukan mengikuti MK.

DPR pun menjadwalkan akan mengesahkan RUU Pilkada ini menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis (22/8). Revisi tersebut dipandang oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa, sebagai bentuk penurunan kualitas demokrasi dan mengancam partisipasi publik dalam proses pemilihan pemimpin daerah. Kontroversi yang dibuat DPR ini membuat banyak elemen masyarakat marah. Desakan menolak RUU Pilkada pun makin menguat baru-baru ini.

Pada tanggal 22 Agustus 2024 selaku Koordinator Lapangan atau Penanggung Jawab aksi tersebut yakni M.Nazmi Ramadhan yang diikuti sekitar kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen Mahasiswa di Kalimantan Barat yang diantaranya adalah Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR), BEM Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, Forum Koordinasi BEM Se-Kalimantan Barat (FKBK), BEM Universitas Muhammadiyah (UMP) Pontianak, BEM Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) Pontianak, BEM Gerakan Mahasiswa

Nasional Indonesia (GMNI) Kalbar, Front Mahasiswa Nasional (FMN), BEM Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Republik Indonesia (PMKRI) Pontianak, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalbar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, PMKRI ST. Thomas More Pontianak, BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pontianak, BEM Fakultas Hukum Untan, BEM Institut Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pontianak.

Proses kegiatan aksi dalam gerakan protes terhadap Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pontianak, dari perspektif mahasiswa, merupakan rangkaian aktivitas yang terstruktur dan didorong oleh kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Tahapan aksi dimulai dari identifikasi isu, di mana mahasiswa secara kritis mengkaji substansi revisi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Mahasiswa menilai bahwa revisi tersebut berpotensi melemahkan partisipasi publik dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Selanjutnya, mahasiswa di Kota Pontianak melakukan konsolidasi internal melalui diskusi terbuka di lingkungan kampus, pertemuan organisasi kemahasiswaan, serta forum-forum independen untuk merumuskan sikap bersama dan strategi aksi.

Aksi ini berlangsung di Tugu Digulis dan dilanjutkan ke Gedung DPRD Kalimantan Barat, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai mengancam hak demokrasi masyarakat. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini di mana seluruh mahasiswa melakukan jalan kaki menuju dari tugu Digulis Untan

menuju kantor DPRD Kalbar. Para demonstran membawa spanduk dan poster yang menolak RUU Pilkada, sambil meneriakkan yel-yel yang mengkritik kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

**Gambar 1.1 Aksi Digulis Memanggil**



Sumber: AntaraKalbar

Terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi diantaranya menghentikan Pembahasan Revisi Undang Undang Pilkada, mendesak Presiden dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang Undang Pilkada dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah ditetapkan, mendorong KPU untuk Mematuhi Putusan MK dan Penolakan Pengesahan UU Pilkada.

Aksi mahasiswa tersebut tidak secara otomatis menjamin pembatalan revisi, namun memiliki potensi besar untuk memengaruhi keputusan pembuat



kebijakan. Keberhasilan demonstrasi tergantung pada konsistensi aksi, skala dukungan dari masyarakat luas, dan sensitivitas pemerintah serta DPR terhadap tekanan publik. Jika aksi dilakukan secara masif dan mendapatkan liputan media yang luas, tekanan politik dapat memaksa DPR atau pemerintah untuk menunda atau membatalkan revisi. Namun, revisi tetap mungkin terjadi jika ada kepentingan politik yang kuat, lemahnya dukungan masyarakat, atau jika demonstrasi kehilangan momentum. Sebagai contoh, meskipun demonstrasi besar berhasil menunda revisi RUU KUHP pada 2019, revisi tetap disahkan beberapa tahun kemudian ketika tekanan publik mereda.

Hingga saat ini, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum disahkan setelah mendapat protes dari berbagai pihak, termasuk aksi demonstrasi mahasiswa, DPR memutuskan untuk membatalkan pengesahan revisi tersebut. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa Pilkada 2024 akan mengikuti putusan MK tanpa perubahan melalui revisi UU. Hingga saat ini, tidak ada informasi terbaru mengenai upaya lanjutan untuk merevisi UU Pilkada.

Melihat dari fenomena yang terjadi diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak. Faktor-faktor seperti kesadaran politik, tingkat pendidikan, serta akses informasi, menjadi penentu penting dalam mobilisasi massa dan penyebaran ide-ide protes. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peran mahasiswa dalam gerakan protes ini sebagai bagian dari studi yang lebih luas tentang partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia. Diharapkan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran aktor-aktor non-pemerintah dalam mempertahankan demokrasi di Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

- 1) DPR menganulir putusan MK dan merevisi Undang Undang Pilkada membuat rakyat geram dan mengamuk.
- 2) Pada tanggal 22 Agustus 2024 ribuan elemen masyarakat turun ke jalan di berbagai kota, menyuarakan penolakan atas revisi UU Pilkada yang dinilai menguntungkan dinasti Presiden Indonesia Jokowi.
- 3) Keputusan DPR sangat bertentangan dengan keputusan MK dan memicu reaksi dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa bahwa keputusan ini mengancam demokrasi dan melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus maka peneliti membatasi masalah hanya pada peran mahasiswa dalam gerakan protes yang sudah dilakukan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu, bagaimana peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mahasiswa dalam gerakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.6.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan terkait bidang Ilmu Politik, serta gerakan sosial mahasiswa. Serta memahami bagaimana undang-undang dibuat dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini bisa memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana Peran mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap revisi undang undang pilkada paska keputusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 di Kota Pontianak, dan berperan dalam proses demokrasi.

#### **1.6.2 Manfaat praktis**

- 1) Bagi DPR, Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan reaksi mahasiswa terhadap kebijakan yang diambil. Ini bisa membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan aspirasi kelompok muda, terutama mahasiswa sebagai agen perubahan.

- 2) Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya peran mereka dalam gerakan protes dan advokasi kebijakan publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan sosial-politik yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami peran penting mahasiswa sebagai pendorong perubahan sosial dan pengawal demokrasi. Dengan demikian, diharapkan munculnya dukungan dan sinergi antara masyarakat umum dan mahasiswa dalam menuntut kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat